

Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku

Syifaatuz Zadida Ilyas^{1*}, Ana Sopanah², Dwi Anggarani³, Khojanah Hasan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Widyagama Malang

¹syifazadida@gmail.com, ²anasopanah@widyagama.ac.id, ³anggaraniuwg67@gmail.com,
⁴janahasanuwg71@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Februari 2023

Disetujui : 10 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to uncover accounting practices in financing the traditional ceremony of the inauguration of the traditional head (Orang Kay) in the Kei Tribe. The research uses an ethnomethodological approach with observation, interview, and documentation methods. Based on the results of interviews and data analysis, in the inauguration of the traditional head (Orang Kay) there is an accounting practice that has characteristics with other tribes. In the inauguration of Orang Kay, there are three sources of financing, namely Yelim, village funds, and city government grants. The allocation of yelim is used to finance the inauguration traditionally, while the allocation of village funds and government grants is used as financing for the inauguration in government. In yelim management there

Keywords: Accounting Practices, Kei Tribe, Local Wisdom, Financial cycles

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman baik dari suku, budaya, ras, agama, maupun bahasa. Keberagaman ini menjadikan ciri khas dari masing-masing daerah. Keberagaman Indonesia salah satunya tercermin dari Suku Kei. Suku Kei merupakan suku yang terketak di Kepulauan Kei. Di Kepulauan Kei terdapat 22 Ratschaap (wilayah adat). Setiap wilayah adat terdiri dari beberapa ohoi (desa). Dalam struktur kepemimpinan, setiap ohoi (desa) dipimpin oleh Orang Kay. Orang Kay berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala adat di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No.03/20. Di dalam perda tersebut tertuang bahwa struktur pemerintahan tingkat ohoi tergabung dengan struktur adat.

Dalam hal adat istiadat, masyarakat Suku Kei sangat teguh memegang adat istiadat hingga saat ini. Kehidupan masyarakat Suku Kei dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur yang menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu. Terdapat beberapa adat ataupun budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat Suku Kei, diantaranya adalah budaya sasi, budaya yelim, pelantikan Orang Kay, festival pesona metikei, dan tradisi *Heri Nen Dit Sakmas*. Diantara beberapa adat atau budaya tersebut yang paling terkenal adalah budaya yelim. Budaya yelim menggambarkan kuatnya persaudaraan masyarakat Suku Kei. Dalam tradisi ini masyarakat saling tolong-menolong dalam membantu satu sama lain, baik dalam bentuk uang ataupun bahan. Bantuan ini biasanya ditujukan ketika ada upacara adat. Termasuk juga dilakukan ketika acara pelantikan kepala adat (Orang Kay). Sumber pemasukan dari acara ini berasal dari budaya yelim, dana desa, serta dana hibah pemerintah kota.

Praktik akuntansi tidak hanya dipandang sebagai media untuk mengelola keuangan pada

dunia bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas input, proses, dan output. Pada realitanya, akuntansi banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi dapat ditemukan dan diimplementasikan dalam aktivitas rumah tangga, belanja, dan hiburan. Akuntansi tidak hanya berfokus pada ayat jurnal debit kredit, akan tetapi akuntansi memiliki pengaruh dan kaitan dengan keberadaan manusia didalam kelompok masyarakat. Dalam penelitian (Andani, 2017) menjelaskan bahwa terdapat nilai yang mempengaruhi akuntansi, seperti nilai agama islam dan nilai adat istiadat. Keterbukaan terhadap budaya modern juga mempengaruhi keunikan praktik akuntansi. Dalam penelitian (Purnamasari, et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan praktik akuntansi Desa Tenganan dengan desa lainnya dalam hal pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset Desa Tenganan didasarkan pada awig-awig yang berlandaskan Tri Hita Karana. Begitu juga dengan penelitian (Sopannah, 2020) yang menjelaskan bahwa terdapat nilai kearifan lokal Suku Osing yang mempengaruhi proses penganggaran di masyarakat adat. Nilai kearifan lokal tersebut yaitu saling menghormati, akuntabilitas moral, dan kepercayaan yang terintegrasi pada proses penganggaran.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya dalam Pembiayaan Ritual Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana nilai kearifan lokal Suku Kei? Bagaimana pembiayaan upacara pelantikan Orang Kay? dan bagaimana pengungkapan akuntansi dalam budaya yelim? Sejalan dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kearifan lokal Suku Kei, mengetahui pembiayaan upacara pelantikan Orang Kay, serta untuk mengetahui pengungkapan akuntansi budaya yelim yang digunakan sebagai pembiayaan dalam upacara pelantikan Orang Kay. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keberagaman praktik akuntansi di dalam Suku yang ada di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Akuntansi Publik

Menurut (Mahsun, 2006) sektor publik yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyedia barang atau jasa untuk publik yang dibayar melalui pendapatan negara atau pajak. Menurut (Erlina et al., 2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dipakai untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau nirlaba. Pengertian akuntansi sektor publik menurut (Mardiasmo, 2009) merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen ataupun bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan ini dikarenakan oleh adanya lingkungan yang memberikan pengaruh. Menurut (Biduri, 2018) komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap sektor publik yaitu : faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi.

Menurut (Rachmat, 2010) secara garis besar akuntansi publik dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi sosial. Akuntansi pemerintahan menyediakan data atau informasi terkait dengan transaksi keuangan yang terjadi pada pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada publik dan pihak yang berkepentingan. Sedangkan akuntansi sosial adalah akuntansi yang diterapkan pada organisasi publik yang bersifat nirlaba atau nonprofit dan bersifat non pemerintahan. Akuntansi pemerintahan terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalam akuntansi pemerintahan terdapat standar yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar tersebut disingkat dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP ditetapkan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Sedangkan akuntansi sosial merupakan akuntansi yang menyusun catatan dan pelaporan atas lembaga/organisasi yang bersifat nirlaba. Akuntansi sosial banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti lembaga keagamaan, yayasan, rumah sakit, lembaga masyarakat, dan lain-lain.

Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi

Dalam setiap daerah praktik akuntansi dapat terpengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan

seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultur, dan faktor demografi. Sudah banyak dilakukan penelitian terkait isu pengaruh budaya terhadap perilaku dalam sistem sosial. Namun dampaknya terhadap praktik akuntansi merupakan bidang penelitian yang baru. Budaya berasal dari bahasan sansekerta yaitu buddahyah, bentuk tunggalnya yaitu buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal dari manusia. Budaya merupakan cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur meliputi agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan setting pikiran yang menjadi pembeda antara suatu kelompok manusia dengan kelompok lainnya. Budaya lokal merupakan bentuk dari nilai-nilai lokal dari hasil pemikiran dan perilaku masyarakat secara alami seiring dengan berjalannya waktu (Asih L et al., 2019)

Dalam penelitian (Gray S, 1998) berpendapat jika nilai budaya dalam suatu negara atau daerah memberikan pengaruh terhadap sifat sistem akuntansinya. Wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai lokal dapat berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi yang akhirnya berdampak terhadap pengungkapan keuangan menjadi penting untuk memastikan komparabilitas pelaporan keuangan di masing-masing daerah sesuai dengan budayanya (Priyastiwati, 2016). Dalam penelitian (Priyastiwati, 2016) juga dijelaskan bahwa budaya individualitas, maskulin, dan serta penghindaran ketidakpastian akan mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif. Penelitian (Hughes S, 2009) menemukan bahwa karakteristik budaya berpengaruh terhadap kemampuan fresh graduate auditor dalam melakukan peninjauan prosedur analitis yang membutuhkan perubahan prediksi di akun neraca.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, menunjukkan budaya mempengaruhi cara individu atau kelompok dalam praktik akuntansi termasuk penyusunan laporan keuangan. Sebagian akuntan atau individu yang berasal dari budaya berbeda, maka dalam menginterpretasikan akuntansi memungkinkan dilakukan dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain budaya dalam praktik akuntansi dapat berpengaruh terhadap peran atau hasil interaksi antara informasi akuntansi dengan perilaku penyaji laporan keuangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang tidak bisa terpisah dari aspek kehidupan. Pengertian akuntabilitas menurut (Lukito et al., 2014) merupakan kewajiban lembaga / penyedia layanan publik untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh keputusan serta pertanggungjawaban dari kinerjanya. Akuntabilitas atau “tanggung jawab” pada umumnya diartikan sebagai kewajiban atau keharusan untuk menanggung dan menjawab dengan kata lain yaitu keharusan untuk menanggung akibat yang timbul dari suatu perilaku atau perbuatan dalam rangka menjawab suatu permasalahan dan persoalan. Akuntabilitas dikaitkan dengan konsep Amanah dimana setiap individu dalam praktik bisnis harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah laporan keuangan (Susilowati L, 2017). Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya fraud (korupsi). Dengan adanya akuntabilitas berarti bahwa suatu proses penganggaran baik dari perencanaan dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi 2 macam (Mahmudi, 2015) yaitu Akuntabilitas Vertikal (Pertanggungjawaban kepada pimpinan / otoritas yang lebih tinggi) dan Akuntabilitas Horizontal (Pertanggungjawaban kepada publik atau kalangan umum yang tidak memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan).

Sedangkan menurut Sheila Elwood dalam (Manggaukang R, 2006) terdapat empat jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Schedler dan Plano dalam (Manggaukang R, 2006) menyebutkan bahwa ada lima jenis akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas fiskal (tanggung jawab atas dana publik), Akuntabilitas legal (tanggung jawab mematuhi hukum), Akuntabilitas program (tanggung jawab dalam menjalankan program), Akuntabilitas proses (tanggung jawab dalam

melaksanakan prosedur), Akuntabilitas outcome (tanggung jawab atas hasil). Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dalam pembiayaan upacara adat pelantikan Orang Kay Suku Kei termasuk dalam akuntabilitas fiskal yang bersifat horizontal karena mempertanggungjawabkan penggunaan atas dana publik kepada masyarakat Suku Kei termasuk kepala marga.

Etnometodologi

Etnometodologi pertama kali dikenalkan oleh Harold Garfinkel sebagai kajian dan metode pada tahun 1967 melalui karyanya yang berjudul “Studies in Ethnomethodology” (Heritage, 2015) Kata etnometodologi merupakan gabungan dari tiga kata Yunani, “etnos”, “metodas”, dan “logos”. “Etnos” berarti orang, “metodas” berarti metode, dan “logos” artinya ilmu. Secara harfiah etnometodologi memiliki pengertian sebagai ilmu tentang metode yang digunakan dalam meneliti bagaimana kehidupan dapat tercipta dan dipahami dari suatu individu (Rahardjo M, 2018). Dengan kata lain, etnometodologi merupakan ilmu atau teori yang didasari oleh paradigma sosial dan dilandasi oleh tindakan sosial. Menurut Garfinkel etnometodologi memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan individu sehari-hari. Etnometodologi tidak terstruktur, namun terfokus bagaimana suatu individu membangun kesadaran dan pemahaman akan struktur (Ritzer G, 2014)

Dalam etnometodologi ada beberapa konsep dasar yaitu indeksikalitas, reflektivitas dan akuntabilitas. Indeksikalitas merupakan pencarian ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul diantara individu atau komunitas. Indeksikalitas digunakan untuk memahami situasi tertentu dengan menggunakan unsur kalimat yang terdapat pada konteks situasi tersebut. Berdasarkan konsep indeksikalitas tersebut, maka dalam etnometodologi diharuskan mampu menempatkan dirinya pada situasi yang dimaksud para anggota bukan memaksakan interpretasinya mengenai realitas kepada para anggota (Mulyana, 2008) Selanjutnya reflektivitas adalah konsep yang berpedoman pada usaha anggota untuk mempertahankan anggapan terkait dengan realita sosial. Ketika anggota memiliki anggapan tertentu, secara bersamaan ia berusaha untuk membangun realita dan mempertahankan anggapannya. Dari anggapan itulah peneliti dapat membangun dunia sosial secara teratur. Selanjutnya akuntabilitas yang dimaksudkan yaitu peneliti melukiskan, menganalisa, mengkritik atau mengidealkan sebuah situasi khusus sebagai penjelas dari penyebab situasi tersebut. Dalam memahami aktivitas dari suatu kelompok (Garfinkel H, 1967) ada empat tahap analisis, yaitu analisis indeksikalitas, analisis reflektivitas, analisis aksi kontekstual, dan penyajian pengetahuan akal sehat tentang struktur sosial.

Kepala Adat Suku Kei (Orang Kay)

Di Kepulauan Kei terdapat 22 Ratschaap (wilayah adat) dimana masing-masing Ratschaap dipimpin oleh seorang raja atau rat. Berdasarkan cerita leluhur, banyak pendatang bergabung datang ke Kepulauan Kei, maka diperlukan pemerintahan yang menaungi seluruh masyarakat. Pemerintahan adat di masyarakat suku Kei terbagi dalam 3 tingkatan pemerintahan yaitu Ratschaap, Ohoi, dan Soa. Berikut ini uraian jabatan-jabatan dalam adat Suku Kei :

1. Rat atau Raja

Rat atau Raja adalah kepala pemerintahan di tingkat Ratschaap. Tugasnya adalah mengkoordinir tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Orang Kay, menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Orang Kay termasuk pelanggaran terhadap adat serta menjaga dan mempertahankan hukum adat.

2. Kapitan (Akbitan) dan Mayor

Merupakan jabatan bagi panglima perang. Tugasnya yaitu membantu Raja dalam menyelesaikan pelanggaran hukum adat terutama yang berhubungan dengan peperangan

3. Orang Kay

Orang kay merupakan pemangku adat tingkat ohoi di kepulauan Maluku sekaligus menjabat sebagai kepala ohoi/ kepala desa. Ohoi merupakan sebuah organisasi untuk mempersatukan faam (marga)

4. Tuan Tan/Toran Nuhu

Tuan Tan adalah tuan tanah yang bertugas menjaga batas-batas tanah.

5. Dir'u, Ham Wang atau Wawat

Dir'u merupakan pemuka yang ahli dalam berbicara dan dianggap adil dalam melakukan pembagian. Nasehat dan pengalamannya didengar untuk kebaikan bersama.

6. Dewan Saniri

Dewan Saniri merupakan dewan perwakilan yang beranggotakan kepala marga. Tugasnya memberikan nasehat mengenai pemerintahan kepada Orang Kay.

7. Mitu Duan (Pemuka Berhala)

Mitu Duan bertugas memimpin upacara adat, memimpin doa dan persembahan maupun memohon keselamatan bagi seluruh warga.

8. Marinyo

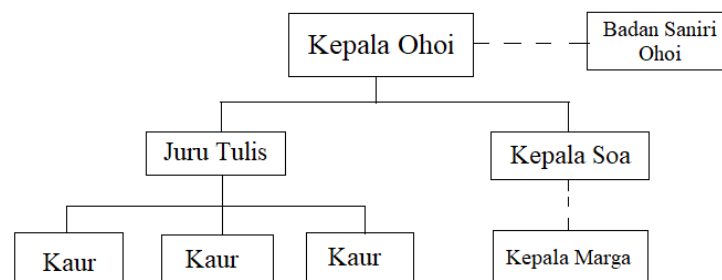
Marinyo adalah jabatan bagi pesuruh kampung yang bertugas menyampaikan perintah atasan kepada masyarakat.

9. Kepala Soa

Kepala soa adalah jabatan yang hampir sama dengan Orang Kay akan tetapi terbatas dalam wilayah dusun. Kepala soa membawahi satu atau beberapa marga.

Kebijakan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam penguatan peran adat desa sebagai penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk desentralisasi kewenangan ke daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ohoi dan Ratschaap. Struktur pemerintahan Ohoi tergabung dengan struktur adat.

Gambar 1. Struktur pemerintahan ohoi berdasarkan Perda Kab.Maluku Tenggara No.03/20

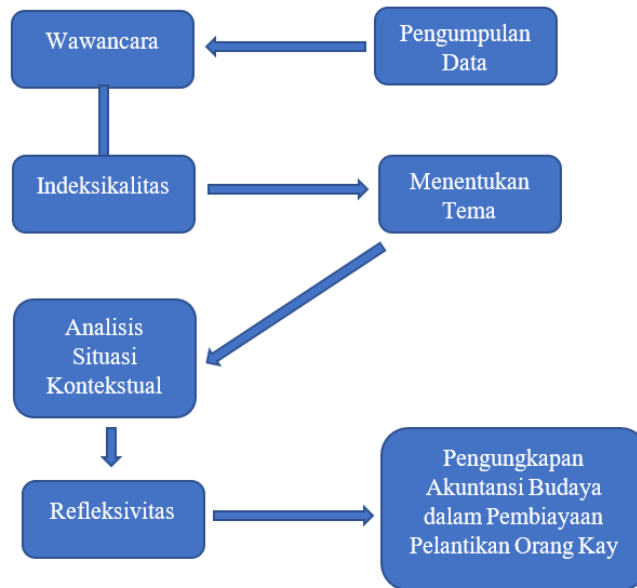


Sumber : (Laimetheriwa S.H., 2020)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Creswell J W, 2017) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan memahami makna (arti) pada individu atau sekelompok orang yang berasal dari permasalahan sosial. Peneliti menggunakan design penelitian studi etnometodologi. Design etnometodologi merupakan pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan tentang perilaku atau Tindakan individu dalam lingkup "etniknya" atau budayanya yang berkaitan dengan pola interaksi dan kajian yang mengarah pada pemahaman makna yang ada didalam kehidupan suatu kelompok (Fatchan P A, 2015). Penggunaan pendekatan ini mengarah terhadap kajian sejarah atau kultural. Etnometodologi bertujuan untuk menganalisa dan menafsirkan kebudayaan, memahami cara hidup orang lain dari sudut pandang masing-masing individu. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan alur sebagai berikut :

Gambar 2. Teknik Analisis Data



Sumber : diolah penulis (2023)

HASIL

Suku Kei sangat kental dengan adat dan budaya. Salah satu tradisi adat budaya yang dianggap paling sakral adalah upacara adat Pelantikan Orang Kay. Pelantikan Orang Kay dilakukan lima tahun sekali. Pada Suku Kei upacara adat Pelantikan Orang Kay dilakukan melalui dua cara, pertama dilakukan dengan cara adat. Kedua, dilakukan dengan cara pemerintahan. Karena menggabungkan proses pelantikan secara adat dan pemerintahan maka dalam hal pembiayaan juga terdapat beberapa sumber pembiayaan dari upacara adat Pelantikan Orang Kay. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa nilai kearifan lokal Suku Kei, pembiayaan, serta pengungkapan akuntansi dalam upacara pelantikan Orang Kay. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Indeksikalitas dan Refleksivitas Nilai Kearifan Lokal Suku Kei

Indeksikalitas	Refleksivitas
<i>Ain Tung Ain</i> (Tolong-Menolong) <ul style="list-style-type: none"> Tercermin dari adanya tradisi budaya Yelim 	Nilai Kearifan Lokal
<i>Nab'lo</i> (Jujur) <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengelolaan keuangan memegang prinsip yang ada di Hukum Adat “<i>Itwait Teblo Uban Ruran</i> (Hidup sejujur-jujurnya dan berjalan tegak lurus)” 	
<i>O mu k'was</i> (Tanggung Jawab) <ul style="list-style-type: none"> Adanya akuntabilitas atas penerimaan serta pengeluaran dari budaya yelim 	

Sumber : diolah penulis (2023)

Dari tabel 1 yang berisi tentang hubungan analisis indeksikalitas dan reflektivitas tentang Nilai Kearifan Lokal Suku Kei, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Kearifan Lokal Suku Kei didasarkan pada hukum Adat yang menjadi pedoman bagi masyarakat Suku Kei yaitu berdasar “Hukum Adat Larvul Ngabal” yaitu, memiliki saling “*Ain Tung Ain* (tolong-menolong)” menanggung beban bersama yang tercermin dalam budaya yelim, “*Nab’lo* (Kejujuran)”, dan “*O mu k’was* (tanggung jawab)”.

Dalam upacara adat pelantikan Orang Kay terdapat dua kali pelantikan. Pertama pelantikan dengan cara adat dan pelantikan kedua dengan cara pemerintahan. Hal ini dikarenakan Orang Kay terpilih secara adat menjabat sebagai kepala adat dan secara pemerintahan menjabat sebagai kepala di tingkat ohoi (desa). Dalam pembiayaan upacara adat pelantikan orang kay terdapat tiga sumber pembiayaan, yaitu budaya yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Hal ini akan digambarkan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Indeksikalitas dan Reflektivitas Pembiayaan Upacara Adat Pelantikan Orang Kay

Indeksikalitas	Reflektivitas
Sumber pembiayaan : Budaya yelim, dana desa, hibah pemerintah kota	Pembiayaan Upacara Adat Pelantikan Orang Kay
Alokasi Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> • Yelim: Kebutuhan internal keluarga dan pembiayaan dalam persiapan pelantikan Orang kay secara adat • Dana desa dan dana hibah pemerintah kota : pembiayaan pelantikan Orang Kay secara pemerintahan 	
Akumulasi Penerimaan dan Pengeluaran Budaya Yelim <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan: Rp85.625.000,00 (berupa uang dan bahan) • Pengeluaran: Rp85.345.000,00 	

Sumber : diolah penulis (2023)

Dari tabel 2 mengenai analisis indeksikalitas serta reflektivitas terkait pembiayaan upacara adat pelantikan Orang Kay, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan untuk acara pelantikan Orang Kay terdapat tiga sumber pembiayaan. Untuk pelantikan secara adat menggunakan pembiayaan yang bersumber dari yelim sedangkan pelantikan secara pemerintahan menggunakan sumber dana dari anggaran dana desa dan hibah pemerintah kota. Yelim yang terkumpul berupa uang dan bahan. Total uang dan bahan jika diakumulasikan adalah sebesar Rp.85.000.000,00. Alokasi yelim adalah untuk kebutuhan internal keluarga dalam persiapan pelantikan. Seperti digunakan untuk menyiapkan suguhan untuk orang yang datang membawa yelim. Alokasi dana desa digunakan untuk biaya persiapan pemilu seperti sewa sound sistem, tenda, biaya rapat konsultasi dan koordinasi, dan pendataan pemilih. Sedangkan alokasi dana bantuan dari pemerintah kota digunakan untuk hari H pelantikan dan tambahan biaya konsumsi.

Dalam upacara adat pelantikan Orang Kay terdapat praktik akuntansi yang didasarkan oleh nilai-nilai kearifan lokal. Praktik akuntansi tersebut tercermin dalam siklus pengelolaan keuangan. Tabel 3 memperlihatkan adanya implementasi nilai kearifan lokal dalam siklus pengelolaan keuangan upacara pelantikan Orang Kay.

Tabel 3. Indeksikalitas dan Refleksivitas Pengungkapan Akuntansi Budaya Yelim

Indeksikalitas	Refleksivitas
<p>Siklus Pencatatan : Secara sederhana dicatat sebagai pos pemasukan dan pos pengeluaran</p>	<p>Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Pembiayaan Budaya Yelim pada Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei</p>
<p>Siklus Pelaporan : Catatan tersebut dimasukkan dalam laporan kas keluarga marga Tarantein.</p>	
<p>Siklus Pertanggungjawaban : Pada Akhir acara penerimaan serta pengeluaran dari Yelim akan dipertanggungjawabkan kepada kepala marga dan masyarakat yang memberi yelim.</p>	

Sumber : diolah penulis (2023)

PEMBAHASAN

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dapat Hukum Larvul Ngabal tersebut tercermin dan berkaitan dengan pembiayaan dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay. Nilai kearifan lokal *Ain Tung Ain* (tolong-menolong) tercermin dalam bentuk Budaya Yelim yang diberikan oleh setiap masyarakat kepada masyarakat lainnya yang sedang menyelenggarakan acara atau hajatan. Hal ini merupakan wujud rasa toleransi dan kepedulian antar masyarakat di Suku Kei dalam meringankan beban sesama. Nilai kearifan lokal suku Kei selanjutnya yaitu *Nab'lo* (Jujur). Masyarakat Suku Kei hidup dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan petuah leluhur yang menjadi pokok pandangan hidup masyarakat kei yaitu "*Itwait Teblo Uban Ruran*" yang artinya kita hidup sejujur-jujurnya dan tetap berjalan tegak lurus. Nilai kearifan lokal ini tercermin dalam proses pertanggungjawaban dari Yelim yang dipakai sebagai pembiayaan dari upacara adat pelantikan Orang Kay. Jadi, masyarakat Suku Kei sangat menjunjung kejujuran agar tetap dapat menjaga persatuan dan kebersamaan yang harmonis. Nilai kearifan lokal Suku Kei berikutnya yaitu *O Mu K'was* (tanggung jawab). Jika dikaitkan dengan upacara adat pelantikan Orang Kay yaitu adanya pertanggungjawaban terhadap Yelim yang telah diberikan oleh masyarakat Suku Kei untuk membantu keluarga calon Orang Kay. Dalam pemilihan kriteria Orang Kay atau Kepala Ohoi selain harus berasal dari marga Tarantein karena marga tersebut dianggap sebagai marga yang kuat dan pantas menjadi pemimpin, masyarakat Suku Kei juga mempertimbangan beberapa faktor lain, seperti latar belakang pendidikan, kedudukan sosial, dan kemampuan memimpin.

Pembiayaan ritual upacara adat pelantikan Orang Kay menggunakan tiga sumber pembiayaan yaitu Yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Pelantikan Orang Kay atau Kepala Ohoi di Suku Kei melalui dua tahap, pertama dilantik secara adat dan yang kedua dilantik secara pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan Orang Kay terpilih sekaligus menduduki jabatan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa). Sumber pembiayaan yelim berfungsi sebagai pembiayaan acara pelantikan Orang Kay secara adat. Sedangkan dana desa dan dana hibah dari pemerintah daerah berfungsi sebagai pembiayaan untuk pelantikan Orang Kay atau Kepala Ohoi dari sisi pemerintahan. Besaran yelim yang terkumpul sebagai pembiayaan dari acara pelantikan Orang Kay (Kepala Ohoi) yaitu Rp85.625.000,00. Nominal tersebut tidak hanya berupa uang, namun juga berupa bahan seperti sembako, emas adat, dan hewan yang akan disembelih. Besaran yelim yang diberikan tidak ditentukan karena yelim bersifat sukarela berdasarkan keikhlasan dan ketulusan memberi. Oleh karena itu, yelim tidak dapat disusun atau direncanakan anggarannya karena kuantitasnya tidak memiliki nilai yang pasti.

Berikut ini data yang didapatkan dari bendahara pelantikan yang berupa rincian sederhana dari pos pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan budaya yelim :

Tabel 4. Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Yelim dalam Pembiayaan Pelantikan Orang Kay

Pos	Keterangan	Rincian	Jumlah
Pemasukan			
	Uang		Rp15.380.000
	Beras	25 Karung	Rp 7.500.000
	Gula	10 Karung	Rp 7.500.000
	Tepung	8 Karung	Rp 2.120.000
	Minyak goreng	13 Gen	Rp 1.625.000
	Air mineral	60 Karton	Rp 1.500.000
	Hewan Sembelih		Rp50.000.000
		Total	Rp85.625.000
Pengeluaran			
	Sewa Tenda (2hari)	5 Unit (@700.000/hari)	Rp 7.000.000
	Sewa Sound System (2 hari)	3 set (@900.000/hari)	Rp 5.400.000
	Sewa kursi (2 hari)	300 unit (@2.500/hari)	Rp 1500.000
	Sewa kendaraan (5 mobil)	5 unit (@250.000/hari)	Rp 1.250.000
	Perlengkapan adat (1 belang)	1 unit (@belang 150.000)	Rp 150.000
	Konsumsi	2 hari	Rp70.245.000
		Total	Rp85.245.000
		Surplus	Rp 380.000

Sumber : bendahara pelantikan (2023)

Dalam pembiayaan acara pelantikan Orang Kay juga memiliki siklus pengelolaan keuangan. Pengelolaan yelim melalui siklus pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam siklus pengelolaan yelim tidak melalui tahap perencanaan atau penyusunan anggaran. Setelah penerimaan yelim, selanjutnya yelim tersebut di catat didalam kas keluarga Marga Tarantein. Pencatatan yang dilakukan juga masih sederhana, hanya berupa pemasukan dan pengeluaran. Ini berarti yelim mengalami siklus pengelolaan keuangan yaitu pencatatan. Yelim merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh masyarakat Suku Kei lainnya kepada orang/keluarga yang memiliki acara atau hajatan. Catatan atas penggunaan yelim akan dilaporkan kepada kepala soa (kepala marga) dan kepada orang yang memberi yelim. Pelaporan tersebut sebagai bukti tanggungjawab dan rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan yelim untuk pembiayaan acara pelantikan Orang Kay. Pencatatan dan pelaporan yelim merupakan bentuk implementasi asas pengelolaan keuangan yaitu asas akuntabilitas dan asas transparansi.

Pengelolaan keuangan dari yelim ini didasarkan hak kepemilikan orang lain seperti yang tertuang pada pasal 7 dari hukum Larvul Ngabal yang berbunyi “Hira i ni fo i ni, it did fo it did (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita)”. Jadi, dasar dalam pengelolaan yelim yaitu kepercayaan masyarakat akan larangan mengambil hak milik orang lain. Jika larangan ini dilanggar maka akan ada sanksi sesuai hukum adat. Penyelesaian pelanggaran dilakukan oleh Kepala Soa, Orang Kay, atau Raja secara berjenjang apabila tingkatan yang paling rendah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Sanksi ditentukan berdasarkan keputusan sidang majelis kerapatan adat (dewan seniri).

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak Nilai Kearifan Lokal dari masyarakat Suku Kei yang mempengaruhi tata cara kehidupan masyarakat suku Kei. Termasuk berpengaruh terhadap proses pelantikan Orang Kay atau Kepala Ohoi. Dalam siklus pengelolaan keuangan yelim terdapat pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaannya, yelim tidak dapat disusun atau direncanakan anggarannya karena nominal atau kuantitasnya tidak dapat diprediksi. Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman atas praktik akuntansi budaya dalam pembiayaan upacara adat. Penelitian ini juga dapat menambah nilai dalam khazanah ilmu akuntansi, khususnya terkait hubungan antara praktik akuntansi dengan kebudayaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber acuan atau referensi bagi akademis yang ingin memperluas dan mendalami pemahaman terkait praktik akuntansi dalam suatu kebudayaan. Selain itu manfaat bagi pemerintah daerah Maluku adalah untuk melestarikan warisan budaya Yelim sebagai pembiayaan dan wujud saling tolong-menolong dalam masyarakat Suku Kei.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan pelantikan Orang Kay terdapat tiga sumber pembiayaan. Dana desa dan hibah pemerintah digunakan sebagai pembiayaan pelantikan secara pemerintahan, sedangkan budaya yelim digunakan sebagai pembiayaan pelantikan secara adat. Pembiayaan budaya yelim kuantitasnya tidak ditentukan dan tidak bisa dianggarkan. Oleh karena itu pengungkapan akuntansi terhadap budaya yelim hanya melalui proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban kepada kepala soa (marga). Pengungkapan serta praktik akuntansi yang dilakukan oleh Suku Kei ini berdasarkan nilai kearifan lokal *Ain Tung Ain* (Tolong-menolong) dalam bentuk budaya yelim, *Nab'lo* (Jujur), dalam bentuk pencatatan budaya yelim, serta *O Mu K'was* (Tanggung Jawab) yang diimplementasikan dalam akuntabilitas dari budaya yelim.

REFERENSI

- Andani, N. (2017). Akuntansi Pernikahan Muslim Bali (Studi Etnografi di Kampung Lebah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Asih L, Wardana, Gunadi, Sari, Cahyani R, & Ningsih. (2019). Pagaruh Budaya Lokal Dalam Praktek Akuntansi Organisasi Perangkat Desa Gobleg. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Humainika*.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Creswell J W. (2017). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mix Methode Approach*. SAGE Publication Ltd.
- Erlina, Rambe O.S, & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Fatchan P A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerbit Ombak.
- Garfinkel H. (1967). *Studies In Ethnomethodology*. Prentice Hall.
- Gray S. (1998). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. *Abacus*.

- Heritage, J. C. (2015). *Etnometodologi. In Giddens, A. and Turner, J. (eds). Social Theory Today: Panduan Sistematis, Tradisi, dan Tren Terdepan Teori Sosial*. Pustaka Belajar.
- Hughes S. (2009). The Impact of Cultural Environment on Entry Level Auditors Abilities to Perform Analytical Procedures . *Journal of International Accpunting, Auditing, and Taxation*.
- Laimheheriwa S.H. (2020). Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Lukito, Penny, & Kusumawati. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua* . BPEE Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Manggaukang R. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mulyana. (2008). *Etnometodologi : Selayang Pandang. Media KOM*.
- Priyastiwi. (2016). Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi Auditing dan Praktik Akuntansi Internasional. *Jurnal Riset Manajemen*.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. CV Pustaka Setia.
- Rahardjo M. (2018). *Apa Itu Studi Etnometodologi?*
[Http://Repository.Uinmalang.Ac.Id/2435/1/2435.Pdf](http://Repository.Uinmalang.Ac.Id/2435/1/2435.Pdf).
- Ritzer G. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Kencana.
- Susilowati L. (2017). Tanggung jawab, Keadilan, dan Keberanian Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.